



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2011 – 2012
Masa Sidang : III
Rapat : Ke -
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Februari 2012
Sifat : Terbuka
Pukul : 11.40 WIB s.d 17.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara : Evaluasi pengelolaan dan rencana pengembangan jalan Tol di Indonesia
Ketua Rapat : Ir. H. Mulyadi
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota : dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Kepala BPJT, dan para Direksi perusahaan pengelola Jalan Tol beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 11.40 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Kepala BPJT, dan para Direksi perusahaan pengelola Jalan Tol pada hari ini adalah evaluasi pengelolaan dan rencana pengembangan jalan Tol di Indonesia
3. Ketua mempersilakan kepada Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala BPJT, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, dan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri, untuk menyampaikan paparan dan penjelasan.
4. Ketua mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan BPJT agar dalam menyesuaikan tarif tol, diawali dengan memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol.
2. Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan BPJT untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum yang belum dipenuhi oleh operator jalan tol serta menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Komisi V DPR RI.
3. Dalam mengevaluasi penyelenggaraan jalan tol eksisting dan perencanaan tol yang akan datang, Komisi V DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan BPJT untuk melibatkan seluruh *stakeholder* terutama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Korps Lalu Lintas Polri.
4. Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan BPJT untuk menyampaikan data volume kendaraan dan lintas harian rata-rata untuk semua ruas tol yang beroperasi kepada Komisi V DPR RI.
5. Komisi V DPR RI meminta Korps Lalu Lintas Polri untuk menyampaikan data titik-titik rawan kemacetan dan rawan kecelakaan di semua ruas tol yang beroperasi kepada instansi terkait.
6. Komisi V DPR RI mendorong penguatan kelembagaan BPJT dengan menertibkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum operator jalan tol dan memastikan terlaksananya butir-butir dalam kontrak Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan jalan tol.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.20 WIB.

Jakarta, 16 Februari 2012

**DIRJEN BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM,**

TTD

DJOKO MURJANTO

**DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

TTD

SUROYO ALIMOESO

WAKIL KAKORLANTAS POLRI,

TTD

DIDIK PURNOMO

KETUA RAPAT,

TTD

MULYADI

**DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
LOGISTIK KEMENTERIAN BUMN,**

TTD

SUMARYANTO WIDAYATIN

KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL,

TTD

A. GANI GHAZALI